

EFEKTIVITAS DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN TAKALAR

Nurfadila Nurfadila^{1*}, Abdi Abdi², Syukri Syukri³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the constraints faced by the Inspectorate in supervising the utilization of BOS allocations in Takalar District. This study uses qualitative methods. Data collection techniques are carried out using data reduction techniques, data presentation, data verification and drawing conclusions. The results of the study show that the level of effectiveness of Inspectorate supervision is through four indicators, namely: 1) Productivity in managing BOS funds has been able to achieve the supervision target for the inspectorate by complying with applicable SOP audits, reviews and surveys. 2) Adaptability in the communication aspect in the management of BOS funds is still not going well. 3) Job Satisfaction is still experiencing a low level of satisfaction, the main factor of dissatisfaction experienced is derived from the aspect of ability. 4) The search for resources is not yet sufficient, this can be measured from the education level of the Inspectorate staff in Takalar Regency.

Keywords: supervision effectiveness, bos funds

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan alokasi BOS di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas pengawasan Inspektorat melalui empat indikator, yaitu: 1) Produktivitas dalam pengelolaan dana BOS telah mampu mencapai target pengawasan bagi pihak inspektorat dengan taat pada SOP audit, review dan survei yang berlaku. 2) Kemampuan adaptasi dalam aspek komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS masih belum berjalan dengan baik. 3) Kepuasan Kerja masih mengalami tingkat kepuasan yang rendah, faktor utama ketidakpuasan yang dialami adalah berasal dari aspek kemampuan. 4) Pencarian sumber daya belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada di Kabupaten Takalar.

Kata kunci: efektivitas pengawasan, dana bos

* nurfadila@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sejak digulirkannya kebijakan pemerintah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan upaya lanjutan dalam memenuhi amanat UUD 1945 khususnya bab XIII pasal 31 ayat satu yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Namun kenyataannya menunjukkan ada banyak hambatan dalam implementasinya. Salah satu penghambatnya adalah sebagian masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan gratis bagi SD dan SMP, dengan direncanakannya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS)

sehingga masyarakat yang tidak mampu membiayai anaknya bersekolah cukup membantu.

Komponen yang dapat dibiayai dana BOS meliputi Penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, dan pembayaran honorer, (Fattah, 2018:23).

Pada umumnya pendidikan di Indonesia masih kurang dalam pengadaan sarana dan prasarana, meskipun pemerintah sudah melakukan upaya seperti membangun sekolah di daerah terpencil, mengirim tenaga-tenaga kerja khususnya guru ke desa-desa terpencil yang ada di Indonesia akan tetapi masih saja ada anak bangsa yang belum bisa menikmati sarana dan prasarana yang lengkap. Pendidikan di Indonesia pun cukup dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain namun pemerintah tidak putus asa dengan ketertinggalan ini, untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia khususnya pemerintah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi semakin baik. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2019:194).

Departemen Pendidikan Nasional sejak pertengahan 2005 meluncurkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini dibuat dengan arah awal menggratiskan biaya bagi setiap siswa-siswi. Sebelum program bantuan operasional sekolah digulirkan sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan berkaitan dengan pembiayaan program wajib belajar. Berkenaan dengan program sekolah gratis yang mengiringi program BOS sebenarnya masih belum tuntas.

Untuk meningkatkan keefektivan pelayanan Dana Bantuan Operasional Sekolah banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang dianggap mempunyai peranan

yang penting adalah penyelenggaraan pelayanan dana bantuan operasional sekolah secara efektivitas sesuai Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan demikian dana BOS merupakan bantuan dari pemerintah kepada siswa-siswi yang kurang mampu membiayai sekolahnya agar mendapatkan pendidikan yang layak karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas yang lengkap demi kelancaran proses belajar mengajar yang efektif. Bentuk pelayanan yang efektif antar masyarakat dengan pemberi pelayanan (*provider*) disadari sering terjadi perbedaan persepsi.

Inspektorat kabupaten Takalar merupakan institusi pengawasan yang internal di lingkungan pemerintah kabupaten Takalar. Salah satu dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Takalar yaitu pengawasan atau kegiatan evaluasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir adanya penyelewengan dan deteksi dini terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS).

Namun kenyataannya sampai saat ini Inspektorat masih memiliki kendala dalam pekerjaan, pada saat melakukan pengawasan di sekolah yang ada di kabupaten Takalar seperti susah mendapatkan dokumen yang diminta oleh Inspektorat, ketidaksiapan bendahara memperlihatkan data dikarenakan belum sepenuhnya menyelesaikan atau mengolah data dan juga mengulur-ulur waktu. Adapun masalah lain yaitu masih ada penggunaan dana BOS yang tidak sesuai pada pelaksanaan dana BOS yang dapat di dapati di beberapa sekolah di kabupaten Takalar, dimana dana BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai petunjuk teknis BOS yang tercantum di juknis, misalnya adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga yang diluar dari kegiatan dinas pendidikan atau tidak berkaitan dengan sekolah. Adapun beberapa sekolah di kabupaten Takalar yang memiliki permasalahan hampir sama, yaitu SD No. 124, SDN No.218, dan SDN No. 15 di kabupaten Takalar yang di dapati pada saat observasi awal

yakni dimana Administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS yang belum tertib, seperti terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana BOS tidak dilengkapi bukti-bukti pendukung serta penyempurnaan penulisan bukti-bukti tersebut, penanggungjawaban tidak lengkap atau tidak valid.

Inspektorat sangat berperan penting dalam hal pengawasan maupun pemeriksaan penggunaan dana BOS di setiap sekolah. Tidak semua sekolah di kabupaten Takalar diawasi dan diperiksa oleh Inspektorat selebihnya diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Untuk tingkat menengah keatas atau SMAN maupun SMA swasta, Inspektorat kabupaten Takalar tidak turun langsung dalam pengawasan atau pemeriksaan terkait dana BOS yang digunakan karena Inspektorat provinsi yang akan turun langsung memeriksa dan mengawasi.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa

efektivitas lebih memfokuskan pada pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara agar dalam pelaksanaannya tepat waktu.

Siagian (2018:151) berpendapat bahwa Efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan pengertian menurut (Gie, 2017:147) berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektivitas kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Menurut pendapat (Mahmudi, 2016:92) mendefinisikan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan.

Menurut (Huda 2017:34) Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi maupun umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (dalam Makmur, 2019:176) adalah pengawasan fungsional. Pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan masyarakat, pengawasan administratif, pengawasan teknis dan pengawasan pimpinan.

Inspektorat adalah badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan. Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang inspektor yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Sedangkan fungsi inspektorat provinsi (Mardi, 2020).

Menurut Mardiasmo (2019), terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sesistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki potensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2020), inspektorat daerah mempunyai tugas

menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2020).

Menurut Boyton (dalam Rohman, 2018), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten atau kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten atau kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

Menurut Mardi (2019) inspektorat kabupaten atau kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten atau kota masing-masing yang diatur dan ditetapkan dengan perda masing-masing kabupaten atau kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat

daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Inspektorat dan Sekolah SD di Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang menerima bantuan dan BOS di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan mengambil lokasi penelitian di kantor Inspektorat dan sekolah yang menerima bantuan

tersebut karena peneliti bermaksud untuk memajukan kualitas penggunaan dana BOS di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran secara aktual dan menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya terkait dengan kualitas pelayanan. Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menyajikan hasil penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari efektivitas pengawasan Inspektorat dalam pemanfaatan alokasi dana BOS di kabupaten Takalar.

Pendekatan kalitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik isu yang belum diketahui. Selain itu, metode kualitatif dapat memberikan rincian detail tentang fenomena yang sulit diungkap dengan metode kualitatif. (Sugiyono, 2019). Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*Indepth interview*), observasi, data dokumentasi.

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk

memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai konteks, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural condition*). Sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih menitikberatkan pada observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono,2019).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, dalam (Sugiyono,2019) yaitu: Pengumpulan data Reduksi Data Penyajian Data Kesimpulan dan Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas pengawasan inspektorat kab. Takalar ditinjau dari segi produktivitas dapat dikatakan bahwa pencapaian target pengawasan alokasi pemanfaatan dana BOS selalu tepat waktu dan tidak pernah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi terkait pengembangan kinerja masih kurang produktif dalam mengembangkan tugas pengawasan karena cenderung kaku terhadap pedoman pengawasan.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nazir (2021)

bahwa produktivitas pengawasan dana BOS dapat dilihat dari konsistensi dalam proses pelaporan dana penggunaan yang tepat waktu serta mampu mencapai target yang ditentukan.

Produktivitas Pengawasan Dana BOS

Proses pengawasan mulai dari proses Audit, survei maupun review tentunya ada target waktu penyelesaian yang harus dipenuhi agar mampu mencapai target kerja yang diinginkan demi peningkatan produktivitas kerja. Produktivitas adalah sebuah kemampuan dalam proses penyelesaian pekerjaan dengan kesesuaian hasil organisasi pada target yang telah ditentukan.

Produktivitas, merupakan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang sesuai pada target organisasi dan rumusan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk mencapai asil yang optimal.

Tingkat produktivitas dalam pengelolaan Dana BOS telah mampu mencapai target pengawasan bagi pihak inspektorat dengan taat pada SOP audit, review dan survei yang berlaku. Selain itu, pihak sekolah peneriman Dana BOS selalu menggunakan dana BOS secara

bijak dengan memerhatikan target prioritas.

Kemampuan Adaptasi Pengawasan Dana BOS

Proses pengawasan harus mampu menghadapi tantangan lingkungan kerja baik secara internal maupun eksternal. Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki dalam proses pengawasan adalah kemampuan adaptasi.

Kemampuan adaptasi adalah sebuah kemampuan organisasi atau pegawai dalam menghadapi perubahan fenomena yang terjadi pada lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja agar mampu menyesuaikan diri dalam mencapai tujuan kerja yang lebih efektif.

Kemampuan adaptasi dalam aspek komunikasi dalam peneglolaan dana BOS masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh masih seringnya terjadi diskomunikasi yang dialami oleh pihak penerima bantuan dana BOS, dianggap bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak inspektorat tidak konsisten.

Kepuasan Kerja Pengawasan Dana BOS

Kepuasan kerja merupakan pandangan dan perasaan puas atau tidak puasnya individu terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Pengawasan dana

BOS perlu menelisik terkait kepuasan antara pihak pengawas dan pihak penerima bantuan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pihak inspektorat belum memiliki kepuasan kerja yang maksimal.

Kepuasan kerja dalam pengelolaan Dana BOS masih mengalami tingkat kepuasan yang rendah, baik dari pihak pengawas maupun pihak penerima bantuan dana BOS, faktor utama ketidakpuasan yang dialami adalah berasal dari aspek kemampuan adaptasi dan komunikasi yang rendah.

Kepuasan kerja salah satu faktor penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Kepuasan kerja yaitu kemampuan pegawai dalam mencapai suatu hasil kerja atau yang hendak dicapai seorang pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Pencarian Sumber Daya Pengawasan Dana BOS

Permasalahan sumberdaya telah dibahas pada bagian pembahasan sebelumnya, bahwa sumber daya manusia yang dilakukan pihak inspektorat masih minim secara kuantitas dan kualitas, hal ini dapat

dikatakan bahwa sumber daya dalam pengawasan pengelolaan Dana BOS Kabupaten Takalar masih belum efektif.

Pihak inspektorat, penerima dana BOS dan pihak LSM menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Takalar sebelum dana BOS dikucurkan, terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesiapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan operasional sekolah.

Pencarian sumberdaya belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai inspektorat yang ada di kabupaten Takalar. Padahal orang yang melakukan auditor harus benar-benar mengetahui tentang pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Banyaknya sekolah penerima dana BOS saat ini tentunya juga harus dibarengi kemampuan sumberdaya manusia yang ada di kantor Inspektorat kabupaten Takalar.

Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada prpgram selanjutnya. Inspektorat

merupakan sebuah struktur yang berfungsi menggerakkan substansinya yaitu pihak di dalam inspektorat, pegawainya, maupun di luar inspektorat, misalnya sekolah yang diawasi, mengingat fungsi dari inspektorat adalah memeriksa dan mengawasi jalannya dari setiap subsistem. Dalam mengawasi dan memeriksa setiap subsistem inspektorat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang dapat menjadi pedoman bagi inspektorat dalam bertindak. Dan hal ini dapat mempengaruhi setiap subsistem yang ada. Misalnya Inspektorat selalu berpedoman pada persturan perundang-undangan dalam pemeriksaan ataupun pengawasan kepada kepala-kepala sekolah di Kabupaten Takalar agar setiap tindakan yang dilakukan bukan semata-mata tindakan sewenang-wenang melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kelancaran pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila aparat pengawas melaksanakan pengawasan dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan melakukan pengawasan dengan objektif sikap yang disiplin. Menyangkut tentang permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan pada saat inspektorat melakukan pengawasan

terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Takalar.

Efektifitas pengawasan inspektorat kab. Takalar ditinjau dari segi produktivitas dapat dikatakan bahwa pencapaian target pengawasan alokasi pemanfaatan dana BOS selalu tepat waktu dan tidak pernah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi terkait pengembangan kinerja masih kurang produktif dalam mengembangkan tugas pengawasan karena cenderung kaku terhadap pedoman pengawasan.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nazir (2021) bahwa produktivitas pengawasan dana BOS dapat dilihat dari konsistensi dalam proses pelaporan dana penggunaan yang tepat waktu serta mampu mencapai target yang ditentukan.

Kemampuan adaptasi dalam pengawasan alokasi pemanfaatan dana BOS kab. Takalar masih rendah, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena sistem komunikasi yang dialami dilapangan kurang efektif, masih seringnya terjadi kesalahpahaman pedoman atau aturan yang berubah secara tiba-tiba namun tidak disertai dengan sosialisasi yang konsisten.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis pembahasan terkait efektivitas pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS di Kabupaten Takalar yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Proses Pengawasan Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Takalar melalui tiga proses, yaitu Audit mengikuti petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana Inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit penerima dana BOS. kemudian Survei terlebih untuk memastikan kesiapan tim penanggung jawab yang menerima dana BOS, serta Review ke pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah setelah melihat laporan dari dinas pendidikan Kabupaten Takalar. Kendala yang dihadapi selama proses pengawasan Pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Takalar yaitu terkait sumber daya manusia, pendanaan serta regulasi. Tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Takalar masih rendah atau belum efektif, hal tersebut diukur melalui 4 indikator, yaitu: produktivitas dalam pengelolaan Dana BOS telah mampu mencapai target pengawasan bagi pihak

inspektoart dengan taat pada SOP audit, review dan survei yang berlaku. Selain itu, pihak sekolah peneriman Dana BOS selalu menggunakan dana BOS secara bijak dengan memerhatikan target prioritas kemampuan adaptasi dalam aspek komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh masih seringnya terjadi diskomunikasi yang dialami oleh pihak penerima bantuan dana BOS, dianggap bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak inspektorat tidak konsisten kepuasan kerja masih mengalami tingkat kepuasan yang rendah, baik dari pihak pengawas maupun pihak penerima bantuan dana BOS, faktor utama ketidakpuasan yang dialami adalah berasal dari aspek kemampuan adaptasi dan komunikasi yang rendah. pencarian sumber daya belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai inspektorat yang ada di Kabupaten Takalar. Padahal orang yang melakukan auditor harus benar- benar mengetahui tentang pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Banyaknya sekolah penerima dan bantuan operasional sekolah saat ini tentunya juga harus dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar.

REFERENSI

- Ariani, A. (2020). Terapi Keluarga Untuk Memperbaiki Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak. *Procedia: Studi Kasus dan Intervensi Psikologi*, 8(4), p. 162.
- Fattah, N. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gibson, et all. (2017). *Perilaku Organisasi-Teor*. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi.
- Gibson. (2018). *Pengaruh Kinerja Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gie, T. L. (2017). *Efektivitas Implementasi*. Bandung. Liberty.
- Huda. (2017). *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Juniadi. (2018). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kafomay, BSMRV. (2020). Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di SMA Negeri 4 Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5(2)*, pp. 125-150.
- Kurniawan, A. (2018). *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Trans Info Media.
- Larang, H. (2014). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pengadaan Fasilitas Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kalosi Kabupaten Enrekang* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Larasati. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.

- Mahmudi. (2016). *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardi. (2020). *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal*. Padang .www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php. diakses tanggal 20 Juni 2011.
- Mardiasmo. (2019). *Transportasi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masnia., Basri, M., & Rahman. (2021). Analisis Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Volume 12, no 2.